



Analisis Sistem Pengendalian Internal Menunjang Akuntabilitas Dalam Meminimalisir Kecurangan

Rachyu Purbowati, Nurhayati
STIE PGRI Dewantara Jombang
Korespondensi: rachyupurbowati@yahoo.com

Dikirim: 23 November 2020, Direvisi: 29 November 2020, Diterima: 15 Desember 2020

Abstract

The purpose of this study is to Know the Implementation of Internal Control Systems in Supporting Accountability in Minimizing Cheating at KPRI-Bahagia. This research is a descriptive qualitative study. The method of data collection is done using the method of observation, interviews and documentation. The data analysis technique is done through four stages, namely through data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the internal control system was able to support accountability in minimizing fraud, both with steps to improve and develop the KPRI-Bahagia internal control system.

Keywords: *Internal Control System, Accountability, Skill*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Menunjang Akuntabilitas Dalam Meminimalisir Kecurangan Pada KPRI-Bahagia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu melalui pengumpulan data, pereduksian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mampu menunjang akuntabilitas dalam meminimalisir kecurangan, baik dengan langkah perbaikan maupun pengembangan sistem pengendalian internal KPRI-Bahagia.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Kecurangan

A. PENDAHULUAN

Secara alamiah koperasi sesungguhnya memiliki berbagai kelebihan dalam bentuk keunggulan komparatif dalam persaingan dibandingkan dengan rancang bangun badan usaha lain di Indonesia. Keunggulan kooperatif koperasi terbangun

dari jumlah anggota sebagai pangsa pasar, berbagai fasilitas kredit program dengan biaya rendah yang ditawarkan pemerintah melalui anggaran maupun penyisihan laba BUMN, akses terhadap program pendidikan dan latihan dari berbagai institusi dan lain sebagainya. (Sutandi, 2020)

Karakteristik fungsi sosial yang melekat pada koperasi yang tidak semata-mata mementingkan orientasi keuntungan menempatkannya sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Sebagai rancang bangun badan usaha yang paling sesuai dengan sistem perekonomian pancasila, namun sungguh disayangkan koperasi belum mampu menjadi pemeran utama dalam kancah perekonomian Indonesia. Posisinya masih kalah dibandingkan dengan perusahaan milik perseorangan dan perusahaan milik negara.

Gagasan-gagasan baik yang melekat pada koperasi sebagai rancang bangun badan usaha yang ideal di Indonesia, belum mampu menempatkannya sebagai bangun usaha utama setidaknya disebabkan oleh tiga hal. Sebab pertama adalah lemahnya manajemen dan tata kelola koperasi khususnya dalam hal sistem pengendalian intern. Sebab kedua adalah belum terbangunnya rasa memiliki dikalangan anggota koperasi sehingga tak jarang anggota malah memilih jasa atau produk yang disediakan oleh lembaga selain koperasi (Wardana, 2016)

Sebab ketiga adalah belum mampunya koperasi mentransformasi keunggulan komperatifnya menjadi keunggulan kompetitif karena lemahnya jiwa kewirausahaan para pengurus, sehingga koperasi yang seharusnya menyediakan barang dan jasa dengan tingkat harga yang lebih rendah tidak jarang malah menjual produknya dengan harga lebih tinggi dari para pesaingnya (Wulandari & Ikhsan, 2018)

Lemahnya sistem pengendalian intern dalam manajemen koperasi terbukti telah banyak mengakibatkan koperasi berguguran karena tindak kecurangan dan ketidakberesan yang dilakukan oleh pengelola. Kebangkrutan sebuah koperasi karena tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengelola akan berdampak pada ketidakpercayaan anggota koperasi pada suatu kawasan tertentu. Jika ini terjadi usaha mengembalikan kepercayaan masyarakat bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun (Dewi & Putu, 2020)

Di Indonesia sendiri banyak bermuculan berbagai kasus kecurangan dalam akuntansi. Kasus kejahatan perbankan atau manipulasi pajak. Strategik Indonesia memaparkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2011 saja, telah terjadi sembilan kasus pembobolan bank dengan modus kejahatannya bukan hanya kecurangan namun juga karena lemahnya kontrol internal perusahaan terhadap sumber daya manusia (Hardiningsih, 2019)

Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I) dalam penilaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM, mengumumkan kuantitas koperasi memang meningkat, akan tetapi banyak terjadi penyimpangan operasional yang ditemui di sejumlah wilayah di Indonesia. Ribuan koperasi yang

harus ditindak tegas karena melakukan berbagai pelanggaran serius, salah satunya pelayanan kepada anggota nonkoperasi. Penyimpangan ini juga memungkinkan para pengurus koperasi bisa menggelapkan dana nasabah. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian tindakan strategis untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau kecurangan di masa mendatang (Razila, 2019)

The Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Badzlina (2014) : “Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.” Maka dari itu perlunya prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan ialah transparansi, akuntabilitas dan value for money (Putu, 2015)

Sama halnya pada prinsip pengelolalan keuangan perusahaan, perusahaan juga haruslah menjalankan pengelolaan keuangan dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Dan Adanya penurunan atau peningkatan akuntabilitas suatu organisasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena terjadinya kecurangan akuntansi di dalam suatu organisasi (Adelin & Eka, 2013)

Makna transparansi disini ialah keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahlel dkk, 2016), dan Mckinsey dan Howard menyatakan bahwa, akuntabilitas merupakan suatu posisi dimana individu yang memiliki dan mempergunakan kewenangan tertentu yang dapat dikendalikan, dan memang pada kenyataannya terbatas oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrumen pengendalian eksternal, termasuk sistem nilai internal yang berlaku pada institusi yang bersangkutan (Akdon, 2011: 208). Dan pada praktiknya Akuntabilitas dapat diwujudkan dalam bentuk pengelolaan keuangan yang transparan itu sendiri (Rahmi & Asni, 2017)

Jadi dapat ditarik sebuah Korelasi yang gamblang bahwa transparansi pun merupakan unsur dari Akuntabilitas, dengan kata lain adalah transparansi merupakan bentuk tanggungjawab seseorang kepada pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi guna pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Berbagai bukti empiris yang telah didapatkan menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kecurangan akuntansi dibedakan menjadi faktor perusahaan (eksternal) dan faktor dalam diri individu (internal) sebagai pelaku kecurangan itu sendiri (Gusti Ayu, 2016). Faktor eksternal dapat berupa sistem pengendalian internal perusahaan. Tindakan kecurangan dapat juga dipengaruhi adanya sistem pengendalian internal perusahaan dan pengawasan yang lemah oleh atasan, dan faktor internal dapat berupa tingkat tanggung jawab yang dimiliki individu dalam organisasi (Wulandari & Ikhsan, 2018)

Pengurus (manajemen puncak) koperasi sangat berkepentingan memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan oleh para manajer dan para personel (karyawan) berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengurus sangat perlu melakukan pengawasan atau pengendalian atas aktivitas bawahannya. Pengendalian sangat penting agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi tidak berlangsung lama, segera dapat diatasi, agar tujuan tetap dapat dicapai.

Karena itu pula, fungsi pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen, yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen yang lain (perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan). Luasnya kegiatan usaha koperasi mengakibatkan pengurus (manajemen puncak) tidak dapat mengawasi atau mengendalikan secara langsung seluruh kegiatan atau aktivitas koperasi. Untuk itu, pengurus harus mendesain dan membangun suatu sistem pengendalian yang memadai. Salah satu pengendalian yang perlu dibangun adalah pengendalian intern.

The Committee Of Sponsoring Organization Of Freedway Commettee (COSO), (COSO, 2013) yang beranggotakan AICPA dan FEI menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang mempengaruhi manajemen dalam memberikan pemikiran yang memadai untuk mencapai tujuan perusahaan melalui : Pencapaian efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan, (b) Keandalan dala laporan keuangan, (c) Mentaati hukum dan peraturan. Sistem pengendalian internal menyediakan mekanisme guna mendeteksi keterjadian suatu fraud, baik saat fraud itu terjadi, akan terjadi, maupun sebelum terjadi.

Komponen dari Sistem Pengendalian Internal menurut COSO yang dikutip oleh Marshall dan Steinbart (2013:23), menyatakan bahwa sistem pengendalian intern terdiri dari lima komponen, yaitu berupa Lingkungan pengendalian (*control environment*), Penilaian resiko (*risk assestment*), Aktivitas pengendalian (*control activities*), Informasi dan Komunikasi (*information and communication*), Pengawasan (*monitoring*).

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengertian pengendalian internal menurut COSO (2013) adalah :*“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.”* Dengan kata lain pengendalian internal adalah proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel lain dalam perusahaan, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai atas pencapaian tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengertian

pengendalian internal menurut COSO senada dengan definisi yang dinyatakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan American Institute Certified of Public Accountans (AICPA), yaitu sama menyebutkan bahwa pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai atas kehandalan laporan keuangan, operasional yang efisien dan ketaatan pada peraturan yang berlaku. Hanya saja AICPA menambahkan tujuannya dengan pengamanan aset.

Tujuan Pengendalian Internal

Memperhatikan tujuan pengendalian internal yang ada dalam definisi pengertian pengendalian internal di awal dan perbandingannya dengan definisi dari berbagai pihak, maka dapat kita rangkumkan bahwa tujuan pengendalian internal adalah: 1) 1. Kehandalan laporan keuangan. 2) Meningkatkan efektivitas operasi. 3) Ketaatan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. 4) Pengamanan aset.

Pengertian Akuntabilitas

Mckinsey dan Howard dalam (Akdon, 2011: 208) menyatakan bahwa, akuntabilitas merupakan suatu posisi dimana individu yang memiliki dan mempergunakan wewenangnya yang dapat dikendalikan, dan pada realitanya memang dibatasi oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrumen pengendalian eksternal, termasuk sistem nilai internal yang berlaku dalam entitas yang bersangkutan. Dari segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar melalui proses-proses akuntansi (Mahlel, 2016).

Definisi Kecurangan (*Fraud*)

Definisi fraud diungkapkan menurut *the Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Badzlina (2014) : “Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.”

Menurut KUHP Pasal 378, perbuatan curang sendiri adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (Tuanakotta, 2016)

Kecurangan merujuk pada Black Low Dictionary dalam Tungga (2010) merupakan kesengajaan atau salah pernyataan didalam suatu kebenaran ataupun keadaan yang disembunyikan dari fakta yang material dan dapat mempengaruhi individu lain untuk mengerjakan perbuatan atau tindakan yang bersifat merugikannya, biasanya berupa kesalahan tetapi didalam beberapa permasalahan (khususnya dilakukan secara sengaja) memungkinkan merupakan bentuk kejahatan.

Teori-Teori Kecurangan

- 1) Fraud triangle berupa konsep yang dikemukakan Donald R. Cressey tahun 1953 yang menjabarkan tentang penyebab munculnya kecurangan (Tuanakotta, 2012). berdasarkan fraud triangle, terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya fraud yaitu tekanan, rasionalisasi, dan peluang.
- 2) Fraud Diamond adalah teori yang kedua sebagai penyempurna dari teori fraud triangle. Fraud Diamond ada tahun 2004 yang dicetuskan oleh Hermanson dan Wolfe. Didalam fraud diamond, Hermanson dan Wolfe memunculkan elemen keempat yaitu berupa kemampuan. Menurut fraud diamond, ada empat faktor yang menjadi penyebab terjadinya fraud yaitu tekanan, rasionalisasi, peluang, dan kemampuan.
- 3) Fraud Pentagon adalah teori fraud yang paling baru didalam mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan dan menjadi penyempurna dari fraud triangle dan fraud diamond. Fraud Pentagon dicetuskan oleh Crowe Howarth tahun 2011. Terdapat lima faktor yang menjadi pendorong terjadi kecurangan pada fraud pentagon.

C. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif Dengan pendekatan Deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan penelitiannya pada bagaimana penerapan sistem pengendalian internal mampu menciptakan sebuah informasi yang memiliki akuntabilitas yang tinggi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan di dalam organisasi melalui Sistem Pengendalian Internal yang merupakan proses yang mempengaruhi manajemen dalam memberikan pemikiran yang memadai untuk mencapai tujuan perusahaan melalui: Pencapaian efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan, (b) Keandalan dalam laporan keuangan, (c) Mentaati hukum dan peraturan. Dan Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. *key Informana* dalam

penelitian ini adalah kepala dan staf KPRI Bahagia Departemen Agama. Data di olah dengan teknik triangulasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan Pengendalian:

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan informan terkait dengan bagaimana bentuk kebijakan yang dibuat oleh KPRI-Bahagia dalam komitmennya terhadap integritas dan nilai-nilai etis dalam berorganisasi: “Tidak ada kode etik disini, Hanya himbauan tidak secara tertulis, Namun Kami berupaya memberi teladan yang baik kepada anggota yang lain, serta selalu menjaga komitmen dan perilaku yang etis sebagai karyawan koperasi Bahagia. Dengan berperilaku jujur dan berhati-hati dalam memutus segala perkara, Tidak ada penilaian kinerja karyawan hanya jika terjadi permasalahan yang masih dinggap wajar hanya ditegur, untuk pihak eksternal yang menilai kinerja organisasi hanya pengawas Dinkop” **(Kepala koperasi)**

“Pengurus selalu menjaga perilaku etisnya seperti berperilaku jujur dalam segala hal, mempertanggungjawabkan segala sesuatu, transparan kepada anggota. agar selalu dipercaya oleh anggota sehingga dapat menjadi teladan yang baik untuk yang lain, dan selalu mengomunikasikan segala sesuatu kepada anggota. Ndak ada penilaian kinerja untuk karyawan, pengurus dan pengawas. Dan untuk pihak eksternal sebagai pengawas ya Dinas Koperasi” **(Ketua)**

KPRI-Bahagia tidak memiliki tata tertib maupun kode etik dalam berorganisasi, namun para karyawan dan pengurus berkomitmen selalu berperilaku etis dengan berperilaku jujur dalam menjalankan tanggung jawabnya, berhati-hati dalam mengambil keputusan sesuai prosedur, dan selalu mengomunikasikan segala sesuatu kebijakan kepada anggota, sebagai upaya menjaga kepercayaan anggota.

Penilaian Risiko

Menetapkan tujuan dengan jelas

Berdasarkan wawancara dengan informan terkait Bagaimana organisasi menetapkan tujuan dengan jelas dan realistis, informan mengatakan : “Setiap laporan keuangan punya tujuan masing-masing, laporan keuangan yang kami terbitkan ada 6 yaitu : Neraca beserta penjelasan, Perhitungan Rugi/Laba , Rencana Pend. Belanja, Laporan Tri Bulan, Laporan semester, Laporan tahunan. lalu kami menentukan target-target usaha melihat pencapaian usaha” **(Kepala koperasi)**

“kami menetapkan target keuangan yang realistis melihat dicapai ditahun lalu, dan melihat keadaan usaha meliputi : Plafon pinjaman, jasa yang dikenakan pada pinjaman, biaya-biaya lain, pendapatan unit usaha seperti foto haji, toko, sewa bus, sewa gedung, dan usaha lain. Agar tidak menjadi beban bagi pengelola maupun pihak lain. Setiap laporan keuangan punya tujuan masing-masing, laporan keuangan yang kami terbitkan ada 6 yaitu : Neraca beserta penjelasan, Perhitungan Rugi/Laba , Rencana Pend. Belanja, Laporan Tri Bulan, Laporan semester, Laporan tahunan” **(Ketua)**

Dalam menentukan tujuan yang jelas dan realistis pengurus melihat kondisi usaha dan melihat pencapaian ditahun sebelumnya.

Aktivitas Pengendalian

Menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian, Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan informan terkait dengan bagaimana

pengembangkan aktivitas pengendalian yang diterapkan KPRI-Bahagia pasca salah satu unit bisnis teridentifikasi telah terjadi penyelewengan : "...akibat kecolongan karyawan dulu, dan saya juga kena teguran dari pengurus, karena saya menyadari saya lengah untuk memantau toko. Lewat rapat diputuskan dua karyawan toko harus dikeluarkan. Dan sekarang tugas saya dibatasi hanya sebagai penanggung jawab, tapi tetap voucher-voucher pembelanjaan dikumpulkan disaya, dan keuangan toko sepenuhnya dikelola dan dipantau bagian kasir umum pak misbah" (**Kepala Toko**)

"... sekarang diberlakukan kebijakan stok opname dilakukan harus satu bulan sekali, order satu minggu dua kali yaitu hari senin dan kamis, selisih materilnya turun jadi 400, kalau dibawah 400 kita yang tanggung, kalau diatas 400 kasir toko yang tanggung, setor sama laporanpun hari senin sama kamis, ndak ada stok barang..." (**Kasir**)

Pengurus, manajemen dan pengawas membuat kebijakan pasca terdeteksinya kecurangan yang terjadi dalam unit usaha toko yang dikepalai oleh bagian pembukuan Unit Simpan Pinjam. Dimana kepala toko hanya sebagai penanggungjawab bukan lagi sebagai penyimpan dan pengelola keuangan toko. Semua diserahkan kepada kasir umum.

Pemantauan

Melaksanakan evaluasi berkala dan berkesinambungan, berdasarkan wawancara dengan informan terkait dengan bagaimana evaluasi berkala dan berkesinambungan yang dilakukan KPRI-Bahagia: "...evaluasi secara berkalanya dilakukan oleh kepala toko maupun kasir umum diunit usaha toko yang memang sudah pernah terjadi penyelewengan oleh karyawan, yang dievaluasi itu terkait kebijakan yang dibuat apa sudah memperbaiki keadaan toko, apa kebijakan tersebut masih menyisakan permasalahan dan juga menimbulkan permasalahan baru" (**Kasir**)

"Iya, kami melakukannya pada unit usaha toko, dari pemantauan lalu dibuat pijakan untuk membuat kebijakan." (**Kepala koperasi**)

"Iya, hasil kegiatan monitoring saat ini bisa jadi sebagai dasar pembuatan desain pemantauan dikemudian hari, seperti kalau pada bulan ini saya menemukan sebuah kelemahan dalam kegiatan operasional, saya akan segera mengomunikasikan kepada pengurus dan manajemen untuk mendiskusikan solusinya. Dan nanti akan didiskusikan apa perlu pemantauan lebih lanjut" (**Koordinator Pengawas**)

PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal menunjang Akuntabilitas. koperasi menurut Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 yaitu "Badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi" Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus memperoleh SHU yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usahanya (Wahyudin, agus, dkk, 2014). Menurut Titik S. Partomo (2013) tujuan perusahaan koperasi, antara lain sebagai berikut. a) Mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari satu (beberapa) barang dan jasa, dan menekan serendah-rendahnya biaya produksi, yang harus lebih rendah atau sekurang

kurangnya sama dengan biaya produksi para pesaingnya. b) Melindungi potensi ekonomisnya, menjaga atau mengamankan likuiditasnya, dan menciptakan inovasi.

Lingkungan Pengendalian:

Prinsip 1 : Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etis, KPRI-Bahagia tidak memiliki tata tertib maupun kode etik dalam berorganisasi yang menjelaskan benar atau salah dalam kegiatan bisnis, namun para karyawan dan pengurus berkomitmen selalu berperilaku etis dengan berperilaku jujur dalam menjalankan tanggung jawabnya, berhati-hati dalam mengambil keputusan sesuai prosedur, dan selalu mengomunikasikan segala sesuatu kebijakan kepada anggota, sebagai upaya menjaga kepercayaan anggota.

Prinsip 2: Independensi direksi terhadap manajemen dalam menjalankan Tugas. Pengawas dan pengurus mensejajarkan diri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya salah satunya memantau dan mengevaluasi kegiatan operasional KPRI-Bahagia, tanpa memandang jabatan dan beban atas perbedaan kekuasaan. Demi terciptanya profesionalitas dan mampu semaksimal mungkin mengevaluasi kegiatan bisnis, tanpa berat sebelah menganggap perbedaan kekuasaan antara pengurus dan pengawas.

Manajemen Resiko:

Prinsip 1: Menilai potensi risiko fraud, KPRI-Bahagia tidak memiliki Pembagian tugas dan tanggungjawab secara tertulis untuk karyawan, pengurus, pengawas dan manajemen. KPRI-Bahagia membuat kebijakan pasca terdeteksinya penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan yaitu kepala toko dan kasir toko. Atas hal tersebut Kepala toko hanya sebagai penanggung jawab unit bisnis dan kasir umum sebagai pengelola bertugas memantau dan mengevaluasi kebijakan tersebut secara rutin.

Prinsip 2: Mengidentifikasi dan menganalisa perubahan yang signifikan
Pengurus selalu mengidentifikasi dan menganalisa perubahan-perubahan eksternal yang mempengaruhi kebijakan di KPRI-Bahagia terkait produk-produk dari unit-unit usaha koperasi. Yang menjadi perhatian adalah unit usaha pertokoan, karena unit tersebut masih baru. Kepala toko dan kasir umum mengevaluasi kebijakan yang sudah disepakati oleh pengurus, pengawas dan pengelola yang diperuntukkan kepada unit toko yang bekerja sama dengan B-Mart.

Aktivitas Pengendalian

Prinsip 1: Menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian

Pengurus, manajemen dan pengawas membuat kebijakan pasca terdeteksinya kecurangan yang terjadi dalam unit usaha toko yang dikepalai oleh bagian pembukuan Unit Simpan Pinjam. Dimana kepala toko hanya sebagai penanggung jawab bukan lagi sebagai penyimpan dan pengelola keuangan toko. Semua diserahkan kepada kasir umum.

Prinsip 2: Menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi, KPRI-Bahagia tidak memiliki kebijakan untuk melakukan pengembangan aktivitas pengendalian umum atas teknologi, bahkan KPRI-Bahagia tidak memiliki kebijakan untuk memantau dan memeriksa sarana teknologi operasional seperti komputer dan alat cetak kantor (Printer) yang sering digunakan, namun manajemen memiliki anggaran dalam perbaikan sarana teknologi, bentuk pengendalian umum atas teknologi yang diterapkan oleh KPRI-Bahagia ialah berupa catatan manual sebagai input informasi sebelum komputerisasi. Manajemen unit usaha toko, tidak memiliki anggaran dalam pemeliharaan sarana teknologi, pengendalian umum yang diterapkan oleh unit bisnis toko yaitu surat order pembelian, voucher belanja, dan rekap penjualan harian.

Pemantauan

Prinsip 1: Melaksanakan evaluasi berkala dan berkesinambungan Pengawas internal secara rutin melakukan tugas dan tanggungjawabnya dalam memeriksa dan memantau berbagai bidang dalam KPRI-Bahagia untuk memantau keadaan Koperasi. Pemantauan sendiri adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal secara teratur. Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan apakah dilakukan perbaikan atau pengembangan.

Prinsip 2: Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan, Pengurus, pengawas dan manajemen melakukan evaluasi terkait kendala-kendala dan masalah dalam pencapaian tujuan bisnis, melaksanakan rekomendasi dari pengawas eksternal yang dianggap perlu. Kepala toko dan kasir umum mengevaluasi secara berkala pencapaian toko, dan berupaya membuat kebijakan dalam mengatasi kesalahan dalam perhitungan stok barang, mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pasca terjadinya kecurangan dalam unit tersebut, yang dilakukan kepala toko dan karyawan toko.

Akuntabilitas sebagai upaya meminimalisir kecurangan Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanah baik secara vertikal maupun secara horizontal. Lebih dari itu, akuntabilitas menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output dan akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan transparan kepada masyarakat. (Mardiasmo, 2009: 20), Akuntabilitas secara vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (Dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas secara Horizontal adalah pertanggungjawaban pada masyarakat. Secara vertikal KPRI-Bahagia bertanggungjawab kepada Dinas Koperasi dan UMKM dan secara Horizontal bertanggungjawab kepada anggota.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, komponen Lingkungan pengendalian, komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etis: Koperasi tidak memiliki kode etik tertulis dan juga tata tertib dalam berorganisasi, namun manajemen, pengurus dan pengawas berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai etis guna menjaga integritas, dengan berperilaku jujur dan berhati-hati dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai penerima amanah dari pemberi amanah yaitu Anggota. Komponen Lingkungan Penilaian Resiko, Koperasi selalu memantau jasa dari lembaga keuangan lain yang berada pada satu wilayah sebagai bentuk antisipasi dari perubahan eksternal. Pihak manajemen, pengurus dan pengawas Memantau kebijakan baru yang berlaku pada unit usaha yang telah terdeteksi kecurangan, guna mengevaluasi atas kebijakan tersebut mampu memperbaiki kegiatan operasional unit usaha agar tidak terulang kembali kecurangan yang pernah terjadi. Evaluasi yang sering dilakukan adalah terkait unit simpan pinjam, karena unit tersebut merupakan *core* bisnis KPRI-Bahagia, meliputi : plafon pinjaman, simpanan pokok, jasa yang dikenakan pada produk pinjaman, biaya asuransi, pencapaian angsuran anggota, pencapaian pendapatan unit usaha, serta jumlah anggota karena akan mempengaruhi penetapan target keuangan KPRI-Bahagia. Atas penelitian ini peneliti menyadari bahwa masih

banyak terdapat kekurangan dalam segi materi maupun pengulasan penemuan permasalahan dengan menggunakan pendekatan sistem pengendalian yang diusung oleh COSO, diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan pendekatan lain dan dengan ruang lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelin, V. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada BUMN di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*.
- Adelin, V. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada BUMN di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*.
- Adelin, V., & Eka, F. (2013). Pengaruh pengendalian internal, ketaatan pada aturan akuntansi dan kecenderungan kecurangan terhadap perilaku tidak etis. *Wahana Riset Akuntansi*.
- Dewi, P. A., & Putu, J. (2020). PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS DANA DESA. *Jurnal Akuntansi Profesi*.
- Hardiningsih, P. C. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 21-42.
- Putu, P. S. (2015). Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Fraud (Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Tabanan)". *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* .
- Rahmi, F., & Asni, S. (2017). "Dampak Sistem Pengendalian Internal, Prilaku Tidak Etis, dan Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Perusahaan Developer di Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, 48-66.
- Razila, H. (2019). *PENGARUH PERAN, KINERJA DAN KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (Studi Empiris Satuan Kerja Badan Layanan Umum UIN Suska Riau)*. Riau.

Sutandi, A. C. (2020). *Evaluasi pengendalian internal pada siklus persediaan dan pergudangan untuk meminimalkan risiko terjadinya kecurangan: studi kasus pada CV. A Semarang*. Semarang.

Wardana, I. (2016). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (studi pada pemerintah desa di Kabupaten Magelang). *Diss. Universitas Negeri Semarang*.

Wulandari, R., & Ikhsan, B. R. (2018). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DESA (Studi Kasus Pada Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*.